

Beberapa Permasalahan Tebu Rakyat Intensifikasi dan Industri Gula Indonesia

Oleh Edy Suandi Hamid

1. TRI: Tujuan dan Kenyataan

Program Tebu Rakyat Intensifikasi sudah berjalan di tanah air selama delapan belas tahun, tepatnya sejak 22 April 1975, yang dilegitimasi lewat Inpres No. 9/1975. Walaupun sejarah perjalanan TRI sudah relatif cukup panjang, namun sejak program ini dilaksanakan banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di lapangan untuk mewujudkan sasaran yang digariskan dalam Inpres tersebut. Hambatan dan permasalahan ini tidak saja berkaitan dengan para petani pemilik lahan, melainkan juga mengait pada berbagai institusi yang terlibat dalam pelaksanaan TRI ini, seperti pabrik gula, lembaga keuangan, pemerintah daerah ataupun juga dari koperasi. Padahal program TRI ini secara formal sangat bagus, baik dilihat dari kepentingan makro ekonomi Indonesia maupun kepentingan dari individu para petani yang diharapkan terlihat dalam program tersebut.

Sebagaimana diketahui ada tiga tujuan utama yang disuratkan dalam Inpres No. 9/1975, yaitu:

1. mengalihkan pengusahaan tebu yang semula berada di tangan pabrik gula dengan

sistem sewa, ke tangan petani yang harus mengusahakan sendiri tanaman tebu di atas lahannya;

2. memperbaiki penghasilan petani tebu dengan meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan usaha tani yang lebih intensif;
3. menjamin peningkatan dan kemandapan produksi gula.

Dari yang tersurat dalam tujuan tersebut, maka tampak bahwa sasaran dari Inpres ini sangat luas dan menyangkut perubahan yang mendasar dibandingkan pola atau sistem penanaman tebu sebelumnya.

Petani yang sebelumnya umumnya menyewakan tanahnya kepada pabrik-pabrik gula, dengan Inpres tersebut diarahkan menjadi aktor/pelaku ekonomi yang terlibat langsung dalam proses produksi tebu. Mereka tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai buruh kasar dari pabrik-pabrik tebu diatas tanah miliknya. Petani tebu dengan demikian diharapkan menjadi seperti petani tanaman pangan umumnya, yang bisa menikmati keuntungan, dan sekaligus siap menanggung risiko kerugian dari usaha TRI tersebut. Dalam teknis pelaksanaannya,

Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

petani bekerja dalam kelompok-kelompok tani dan melibatkan koperasi-koperasi unit desa. Dengan kata lain, petani akan dididik menjadi wiraswasta yang mampu berusaha dan mandiri, dalam bentuk kelompok tani maupun koperasi petani dan mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat (Mubyarto, 1984, halaman 93).

Sasaran lain dari TRI ini adalah meningkatkan pendapatan petani melalui intensifikasi, disamping untuk mengejar sasaran nasional lainnya berupa swasembada gula. Sasaran ini secara teoritik memang sangat mungkin untuk diwujudkan, karena kini petani melakukan sendiri aktivitas produksinya, sehingga dimungkinkan untuk sangat serius dalam menangani tanamannya. Dari sini produktivitas diharapkan akan mengalami peningkatan --ceteris paribus -- yang akan meningkatkan penghasilannya. Begitu juga usaha swasembada gula, karena produksi yang diharapkan meningkat akan dapat memenuhi semua permintaan konsumsi di dalam negeri.

Namun dalam kenyataannya sasaran-sasaran tersebut tidak sepenuhnya mewujud. Sebagaimana diketahui, sejak Inpres itu diluncurkan berbagai masalah berkaitan dengan TRI bermunculan, dan didapat kesan bahwa petani mengikuti program TRI bukan karena kesadarannya, melainkan karena "faktor-faktor" lain yang mendorongnya. Penelitian yang diadakan FE UII (1993) menunjukkan bahwa dari 150 petani sampel yang ada di Sleman dan Kulonprogo pada musim tanam lalu (sebelum penelitian) hanya 44 persen yang mengatakan bahwa keikutsertaannya pada program ini menguntungkan. Alasan lainnya adalah karena wajib tanam,

kecocokan lahan, terpaksa, pengaruh lingkungan dan alasan lain-lain. Dengan kondisi seperti ini maka memang sulit diharapkan semua petani (baca: pemilik lahan) TRI untuk secara serius menangani tanaman tebu nya agar hasil yang didapatkan betul-betul optimal.

2. Pendapatan Petani

Memang jika dibandingkan dengan sistem penyewaan seperti sebelum TRI, kini pendapatan petani tebu sudah jauh lebih baik. Namun demikian, jika dibandingkan dengan menanam komoditi pangan lainnya, pendapatan petani tebu (termasuk non-TRI), masih lebih rendah.

Tabel 1 :Pendapatan dari Tanaman Tebu, Sewa Tanah dan Tanaman Pangan lainnya

Pola Kegiatan	Pendapatan	Pendapatan	Persentase Pendapatan Bersih terhadap tebu
	kotor	bersih	
1. Tebu	1.418.617	934.379	100
2. Sewa tanah	-	43.368*	26
3. Padi-padi-padi-padi	1.838.972	1.213.315	130
4. Padi-padi-padi	1.264.640	769.814	82
5. Padi-padi-kedelai	1.892.959	1.238.434	132
6. Padi-padi	864.191	474.666	51
7. Padi-padi-jagung	864.735	507.505	54
8. Padi-padi-kedelai-jagung	1.910.171	1.238.839	133

Sumber: Mubyarto dan Daryanti (1991), yang mengutip dari Kusbianto Adisasmito, dkk, "Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 9/1975 sampai Tahun Giling 1980" dalam Majalah Perusahaan Gula, September 1982, halaman 12.

Produksi padi secara nasional memang menunjukkan peningkatan. Namun demikian peningkatan ini terjadi

karena perluasan areal tanam (ekstensifikasi), dan bukan karena peningkatan produktivitas per lahan yang ada. Ini berarti memberikan indikasi bahwa pendapatan petani per satuan luas lahannya juga mengalami penurunan, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut ini.

yang tahun 1991 sudah mencapai 2.253 ribu ton (Pidato Kenegaraan Presiden, 15 Agustus 1992, hal. 227) -- bukan karena intensifikasi melainkan karena semakin banyak lahan yang disediakan untuk tanaman tersebut. Perluasan areal tanaman tebu ini sejak tahun 1982/1983 sampai tahun

1930	196.592,0	-	11,32	-	147,9	-	2.907.098
1935	28.261,5	-	12,46	-	174,3	-	492.598
1940	81.521,5	-	12,79	-	176,3	-	1.472.484
1950	27.712,0	75,0	10,60	9,43	93,7	31,2	259.771
1952	47.680,0	1.042,0	10,93	11,26	91,4	61,8	441.909
1955	51.495,0	20.617,0	11,16	11,24	128,0	73,3	813.344
1960	55.428,0	17.000,0	10,94	10,61	99,3	57,5	615.810
1965	71.030,0	16.378,0	10,63	9,79	96,6	54,9	775.950
1970	69.172,0	12.505,0	9,07	9,00	92,9	56,7	715.312
1975	83.295,0	21.482,0	10,73	9,21	107,4	59,8	1.035.052
1978	69.827,0	78.361,0	9,11	8,77	83,5	69,5	1.137.354
1980	56.628,5	132.143,8	8,68	9,12	61,1	65,5	1.249.946
1981	50.248,0	142.900,1	7,89	8,92	55,4	66,9	1.250.117
1982	56.195,6	201.359,7	7,90	9,37	42,2	68,1	1.627.545
1983	59.475,1	234.243,8	6,41	7,6	45,4	58,3	1.647.071
1984	79.922,5	206.640,7	6,69	8,56	45,0	65,0	1.707.048
1985	01.755,0	215.334,9	7,10	8,41	47,3	69,5	2.119.496
1986	01.755,0	215.334,9	7,10	8,41	47,9	71,4	2.024.027
1987	97.238,5	236.535,5	6,93	8,64	45,3	70,9	2.118.305
1988	95.235,1	228.066,7	6,36	8,06	41,3	65,6	1.917.422
1989	07.819,8	232.066,7	6,74	7,96	45,2	67,2	2.053.570
1990*	114.168,9	238.210,2	6,76	7,90	48,1	62,9	2.173.857

Sumber: 1930-1983: Boedidjono Wirlatmodjo, dkk., op. cit., hlm 7.

1984-1989: PJGI, op. cit.

* Data sampai Nopember 1990

Gambaran dari tabel tersebut memang tidak secara tegas menunjukkan kecenderungan penurunan, namun lebih pada gambaran fluktuatif. Akan tetapi ini tidak menggugurkan kesimpulan bahwa perwujudan sasaran untuk meningkatkan produktivitas dari petani tebu lewat program TRI tersebut memang perlu dipertanyakan. Kalau kita menggunakan basis tahun 1975 (tahun awal program TRI), maka jika ada ekstensifikasi dapat dipastikan defisit gula nasional akan jauh lebih besar dari yang terjadi sekarang. Peningkatan produksi --

1988/1989 setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata 2,3% (Tim Study Gula, 1990, halaman 57). Sedangkan selama tiga tahun pertama Repelita V rata-rata peningkatan areal tanaman tebu mencapai 3,3 persen per tahun.

3. Berbagai Masalah

Sebagaimana disinggung di muka bahwa banyak masalah yang melingkupi program TRI ini. Masalah-masalah tersebut terutama berkaitan dengan (1) penyediaan dan keterbatasan lahan; (2) pembiayaan

dan permodalan petani; (3) teknis budidaya; (4) penanganan panen dan pasca-panen; (5) produktivitas; dan (6) masalah yang berkaitan dengan kesadaran dan kesukarelaan petani untuk mendukung program TRI itu sendiri.

Berkaitan dengan masalah lahan, maka memang pemerintah mengharapkan agar petani menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tebu. Tujuannya agar produksi gula ini dapat terus ditingkatkan, yang antara lain lewat ekstensifikasi lahan. Namun dengan berbagai perhitungan ekonomis, resiko kegagalan maupun karena kebutuhan untuk jangka pendeknya, maka petani yang umumnya memiliki lahan terbatas enggan untuk menanam tebu dengan TRI ini. Mereka lebih memilih untuk ditanami dengan tanaman lainnya, yang menurut perhitungan lebih menguntungkan dan cocok dengan kebutuhannya. Terlebih lagi jika lahan yang dimilikinya ini berpengairan cukup, sehingga mereka lebih suka menanaminya dengan padi. Akibatnya, penggunaan lahan untuk tebu menjadi berkurang atau mundur waktunya, yang mengurangi pula optimalisasi hasil yang diharapkan. Di samping itu, perpecahan (fragmentasi) lahan yang sempit-sempit yang dimiliki petani menyulitkan untuk mengolahnya secara efisien dan menguntungkan untuk digarap sendiri. Ini membuat petani lebih suka melepas lahannya untuk disewa pihak lain guna ditanami tebu, sehingga misi untuk menjadikan petani "tuan di lahannya sendiri" menjadi tidak kesampaian.

Sebagaimana diketahui, tanaman tebu berbeda dengan tanaman padi yang sudah sangat akrab dengan para petani pada umumnya. Untuk menikmati hasil dari

tanaman tebu waktunya relatif lebih lama (12-14 bulan), dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk persiapan, penanaman hingga panen dibutuhkan lebih banyak ketimbang menanam padi. Lamanya waktu penantian untuk memetik hasil berarti juga memperbesar dana yang dibutuhkan selama masa tunggu tersebut, khususnya dana untuk biaya hidup (cost of living). Petani memang bisa mendapatkan kredit dari bank, namun pencairannya tidak selalu tepat waktu dengan yang dibutuhkan petani, padahal sebagian besar petani mengandalkan dananya dari pinjaman atau kredit tersebut. Penelitian yang dilakukan FE UII menunjukkan bahwa dari 150 responden, pada musim tanam yang lalu sebanyak 87 orang (58 persen) mengandalkan modal kerjanya dari kredit bank. Sedangkan pada musim tanam saat penelitian dilakukan yang memanfaatkan fasilitas kredit bank meningkat menjadi 99 orang (66 persen).

Dalam kaitan dengan masalah kredit ini, bagi perbankan sendiri memang cukup sulit. Mempermudah persyaratan dan pencairan, akan menimbulkan resiko kredit macet yang tinggi dan penyimpangan. Sementara menawarkan dengan pola yang umum dan birokratis, menimbulkan keterlambatan pencairan dan mengganggu kelancaran aktivitas petani. Dalam kaitan ini, upaya pabrik gula dalam penyaluran kredit, kendati sekedar pemberi rekomendasi, kiranya akan memberikan dampak yang positif. Keterlibatan Pabrik Gula, sejauh ini terbatas pada penilaian teknis untuk memberikan rekomendasi apakah layak atau tidaknya lahan itu ditanami tebu, dan melakukan verifikasi atas kebenaran informasi teknis yang berkaitan dengan lahan untuk ditanami tebu

yang diajukan petani itu. Tanpa adanya rekomendasi dari pabrik gula, maka kredit tidak akan diberikan oleh bank.

Keterlibatan pabrik gula sangat penting untuk membantu bank dalam mengambil keputusan agar kredit yang disalurkan cukup aman. Pengalaman pada waktu lalu, dimana kredit bisa langsung diberikan tanpa rekomendasi pabrik gula, telah menyebabkan banyak kredit yang macet. Akan tetapi konsekuensi dari keharusan adanya rekomendasi pabrik gula ini adalah prosedur relatif menjadi lebih panjang. Namun demikian sejauh ini tidak menimbulkan keluhan dari para petani, karena prosedur tersebut tidak secara signifikan membuat pencairan kredit yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Oleh karena itu, peran seperti ini perlu terus dipertahankan, dan bank tetap melibatkan jasa pabrik gula untuk melakukan verifikasi teknis atas pengajuan kredit TRI. Pengalaman pada masa lalu menunjukkan bahwa tanpa adanya rekomendasi dari pabrik gula kredit bisa tetap disalurkan. Akibatnya, banyak terjadi kredit macet. Sekarang ini, dengan keterlibatan pabrik gula, dan prosedur TRI dijalankan secara penuh, maka kredit relatif aman dan kredit macet bisa ditekan.

Soal kemampuan teknis petani untuk menanam tebu dengan hasil yang efisien juga merupakan problematika yang hingga kini sering dihadapi petani tebu kita. Adanya fluktuasi produktivitas per lahan petani, sebagaimana disinggung diatas, tidak bisa dilepaskan dari masalah faktor teknis budidaya tebu tersebut. Tingkat rendemen juga menunjukkan penurunan. Misalnya dari Tabel 2 diatas, tingkat rendemen tebu rakyat pada tahun 1990, yakni sebesar

6,76%, adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat rendemen tahun 1950 yang bisa mencapai 9,43 persen. Bahkan tingkat rendemen tebu rakyat ini pernah mencapai 11,26 persen pada tahun 1952. Walaupun berbagai usaha juga sudah dilakukan, namun sampai sekarang hasilnya belum seperti yang diharapkan. Pabrik gula maupun PPL, misalnya, cukup aktif memberikan penyuluhan, tidak saja bagi petani TRI namun juga petani non-TRI. Dari 47 responden petani tebu bebas yang mengisi kuesioner tentang pernah-tidaknya penyuluhan tentang teknis-produksi, sebanyak 23 orang menyatakan pernah mendapatkan penyuluhan tersebut. Dari 23 responden ini terbanyak (11 responden) menyatakan pernah mendapatkan penyuluhan tersebut dari pabrik gula, sedangkan lainnya dari PPL, bank dan KUD. Sedangkan untuk petani TRI, dari 150 responden yang mendapatkan penyuluhan dari pabrik gula sebanyak 39 orang. Sedangkan lainnya dari PPL (85 orang), bank (31 orang) dan KUD (17 orang), disamping lima orang tidak mengisi yang kemungkinan merasa tidak pernah mendapatkan penyuluhan. Data ini juga menggambarkan bahwa PPL sangat aktif memberikan penyuluhan kepada petani TRI, sedangkan petani bebas kurang mendapatkan perhatiannya.

Sebagaimana diketahui, konsumen dari tebu ini adalah pabrik-pabrik tebu, yang sudah ditentukan bagi setiap petani yang ada, yakni ke pabrik gula pembinanya. Dalam penebangan atau pemanenan tebu ini, juga memerlukan kehati-hatian agar rendemennya tinggi. Penebangan ini, juga pengangkutannya, karena tidak dilakukan oleh petani sendiri, maka sering dilakukan

dengan ceroboh, sehingga mengurangi nilai panen tersebut, yang berarti mengurangi produksi dan pendapatan petani. Di samping itu, karena lemahnya daya tawar menawar petani, mereka juga bisa mengetahui pasti hasil rendeman sebenarnya. Mereka sering merasa direndahkan kadar rendemannya, sehingga menimbulkan keengganan menjual pada pabrik pembina, dan menjualnya pada pabrik gula lainnya yang bisa memberikan rendeman lebih tinggi. Inilah yang sering disebut dengan "tebu tamasya", yang sering dikeluhkan oleh kalangan pabrik-pabrik gula yang kekurangan bahan baku.

Masalah produktivas yang tampak menurun kiranya juga memerlukan pemikiran yang serius untuk kelanjutan program TRI ini. Karena penurunan produktivas bukan saja membuat produksi gula per satuan input menjadi lebih mahal, melainkan juga akan menimbulkan kerugian bagi petani yang menanam tebu tersebut. Padahal mereka ini pendapatannya sudah pas-pasan, dan sebenarnya mempunyai pilihan tanaman lain yang memungkinkan untuk lebih meningkatkan pendapatannya. Karenanya, masalah yang berkaitan dengan teknis produksi, pemilihan bibit, penanganan panen dan pasca panen, perlu dikaji dan dicarikan alternatif terbaik, sehingga tidak menimbulkan kecenderungan penurunan produktivas pada masa-masa selanjutnya, sebaliknya perlu ditingkatkan. Adanya unsur keterpaksaan dalam ikut program TRI juga mempengaruhi produktivas tersebut. Sikap yang demikian mempengaruhi sikap petani untuk secara serius mengelola tanaman tebunya.

4. Masalah Swasembada Gula

Satu pertanyaan yang sering muncul dalam kaitan masalah pertebuan (gula) di tanah air adalah: apakah upaya swasembada gula pasir di Indonesia merupakan hal yang mutlak untuk diperjuangkan? Di satu pihak menyatakan kesetujuannya, karena menganggap bahwa tebu merupakan komoditi pangan, yang dikonsumsi semua masyarakat, sehingga riskan jika tergantung pada impor. Di samping itu, melihat potensi dan pengalaman di masa lalu, maka Indonesia cukup potensial untuk mengembangkan produksi. Dan tentu saja juga karena alasan untuk menghemat devisa yang sangat terbatas yang kita miliki dari ekspor komoditi lainnya.

Di sisi lain, ada pendapat yang menolak memaksakan diri untuk swasembada gula, karena dinilai tidak terlalu efisien. Kita dapat membeli di pasar dunia, yang sering harganya lebih murah dibandingkan Indonesia. Di samping itu, dari kacamata petani, mereka mungkin lebih baik menggunakan lahannya untuk menanam tanaman lain yang memungkinkannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Pendapat tersebut memang masing-masing mempunyai alasan yang cukup kuat. Namun melihat berbagai fakta yang diuraikan dimuka, dan juga konstelasi perdagangan dunia dewasa ini dan kecenderungannya di masa yang akan datang, maka saya cenderung untuk memilih pendapat yang kedua, yakni tidak terlalu melaksanakan diri untuk swasembada gula. Perkembangan produksi perlu dipacu, namun dalam batas-batas yang secara teknis dan ekonomis bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak seperti produksi beras yang

dilakukan secara "all out" dan "at all cost" dipaksakan mencapai swasembada, walaupun biaya dan harganya menjadi sangat mahal. "Jalan" yang ditempuh komoditi beras ini tidak bisa diterapkan begitu saja mengingat posisi gula dan beras -- yang merupakan makanan pokok utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia -- adalah tidak sama.

Kondisi perekonomian global saat ini, dengan diratifikasinya Kesepakatan Putaran Uruguay, akan mengalami perubahan cukup besar. Sistem perdagangan dunia akan menjadi lebih bebas, dan tidak terhalang oleh berbagai proteksi. Hal ini juga berlaku bagi komoditi pertanian. Dengan demikian pasar gula kita juga harus dibuka dari persaingan dengan gula-gula yang dihasilkan negara lain. Jika gula yang dihasilkan biayanya terlalu tinggi, maka mau tak mau orang tidak akan mau membeli gula domestik ini dan lari ke gula impor. Sekarang kita bisa saja memberikan proteksi yang tinggi melalui tarif bea masuk ataupun dengan non-tarif. Namun demikian, dalam jangka menengah hal demikian tidak bisa dilakukan lagi, karena ketentuan GATT akan sangat membatasi tingkat tarif bea masuk, dan mengurangi seminimal mungkin adanya hambatan non-tarif untuk melindungi produsen dalam negeri.

Oleh karena itu, para petani, terutama yang berada di Jawa, sebaiknya diberikan kebebasan dalam menanam lahannya yang terbatas tersebut. Sehingga petani yang betul-betul berminat dan paham seluk-beluk tanaman tebu yang bertahan pada komoditi ini. Petani yang demikian bisa diharapkan memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya karena adanya motivasi dari dirinya sendiri untuk memilih tanaman

tersebut.

Pandangan seperti ini tidak dimaksudkan memperkecil usaha mencapai swasembada gula. Sasaran tersebut tetap saja bisa dicanangkan, namun demikian untuk mewujudkan sasaran tersebut tetap memperhatikan kaidah-kaidah atau proses mekanisme pasar. Artinya, kalau memang harga gula di pasar dunia lebih menarik, maka petani diberi kebebasan untuk memanfaatkan lahannya untuk ditanami tebu karena ada rangsangan harga yang menguntungkan. Sebaliknya kalau harganya tidak terlalu menarik, yakni lebih rendah dibandingkan dengan harga domestik, maka petani juga bebas untuk tidak menanam lahannya dengan tebu, dan pemerintah membuka kran impor dari harga gula yang murah di pasar internasional.

Penutup

Demikianlah beberapa permasalahan dan pokok pikiran yang dapat disajikan dalam makalah ringkas ini. Memang belum semua aspek yang dikemukakan dalam judul di atas dibahas dalam makalah ringkas ini, dengan maksud akan mendapatkan tambahan masukan dari forum diskusi ini. Mudah-mudahan makalah ini bisa menjadi pancingan untuk berdiskusi lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Bank Bumi Daya. *Gula, Tinjauan Produksi dan Pemasaran Gula di Indonesia*, Bank Bumi Daya, Jakarta, 1983.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, BPS, Jakarta, 1991.
- Djisman S Simanjuntak, "Tebu Rakyat Intensifikasi, Peluang Perbaikan dan Kebijakan Alternatif", makalah

Seminar Peranan Industri Gula dalam Pembangunan Nasional, FE Unair, Surabaya, 1985.
 Fakultas Ekonomi UII, draft Penelitian tentang Tebu Rakyat Intensifikasi di Yogyakarta, 1993.
 Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1984.
 Soemartojo (ed), *Perkebunan Indonesia di Masa Depan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, 1984.
 Mubyarto dan Daryanti, *Gula, Kajian Sosial*

Ekonomi, Adutya Media, Yogyakarta, 1991.
 Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan RAPBN 1993/1994*, Republik Indonesia, Jakarta, 1993.
 Republik Indonesia, Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto di Depan Sidang DPR 15 Agustus 1992, Republik Indonesia, 1992.
 Tim Study Gula, *Sistem Tataniaga tebu dan Gula di Beberapa Negara Asia*, Tim Study Gula, Bulog, Jakarta, 1990.

KERAGAAN SITUASI PERGAULAN DI BEBERAPA NEGARA

URAIAN	PHILIPINA	TAIWAN	INDIA	MALAYSIA	THAILAND	PAKISTAN	INDONESIA
Status	NE	NE	NE	NI	NE	NI	SS/NI
Lokasi PG	Tersebar	Terpusat	Tersebar	Terpusat	Tersebar	Tersebar	Terpusat
Prasarana Jalan	Kepulauan	Baik	Kurang	Baik	Baik	Kurang	Kepulauan
Kebijakan Tataniaga							
Harga Dasar	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Harga Tertinggi	Ya	Tidak	Dgn. Kuota	Ya	Ya	Tidak	Ya
			Penyaluran				
Distribusi	Diatur	Bebas	Diatur	Bebas	Diatur	Bebas	Diatur
Lisensi Dagang	Ada+Sanksi	Bebas	Bebas	Ada+Sanksi	Bebas	Bebas	Bebas
Konsumsi/Kap (Kg/Th)	23	25	11	35	18	19	13
Produksi (Juta ton)	1,2	0,6	9	0,8	4	1,8	2
Pendapatan/Kap(US \$. 1985)	580	2.000	270	2.000	800	380	530

Catatan : NE : Not Eksportor
 NI : Not Importer
 SS : Swasembada

Sumber : Tim Studi Gula (1990)

**PERKEMBANGAN AREAL TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI
1988 - 1991
(Hektar)**

L o k a s i	1988	Repelita V		
		1989	1990 ¹⁾	1991 ²⁾
Jawa Barat 3)	13.850	13.857	13.296	13.665
Jawa Tengah 3)	63.080	68.660	68.664	68.358
Daerah Istimewa Yogyakarta 3)	5.550	6.387	6.410	6.621
Jawa Timur 3)	128.448	131.021	132.128	136.660
Sumetra Utara 4)	571	584	482	625
Lampung 5)	2.939	3.884	3.894	4.569
Kalimantan Selatan 6)	199	5.656	5.665	5.296
Sumatera Selatan 7)	-	-	5	124
Sulawesi Selatan 7)	-	-	82	85
Jumlah	214.637	230.049	230.626	236.003

1) Angka diperbaiki

2) Angka sementara

3) Mulai tahun 1975

4) Mulai tahun 1985

5) Mulai tahun 1986

6) Mulai tahun 1988

7) Mulai tahun 1990